

Modal Sosial Masyarakat Pengelola Hutan Kemasyarakatan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Batutegi

Social Capital of Community Forest Management in Batutegi Forest Management Unit

Oleh:

Nindya Tria Puspita^{1*}, Rommy Qurniati¹, dan Indra Gumay Febryano¹

¹Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Jl. Sumantri Brojonegoro 1, Bandar
Lampung, 35145, Lampung, Indonesia

*email: nindyatriap@gmail.com

ABSTRAK

Modal sosial memiliki peran dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) sebagai sumber daya yang dapat mendorong individu atau kelompok untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui modal sosial masyarakat pengelola HKm di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batutegi, Kabupaten Tanggamus yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sinar Harapan dan Gapoktan Mahardika. Pengumpulan data di kedua gapoktan dilakukan dengan wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur, observasi, dan studi literatur. Modal sosial secara kualitatif dianalisis menggunakan unsur kepercayaan, jaringan, dan norma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial berperan positif terhadap pengelolaan HKm, sehingga masyarakat tetap menjaga kelestarian hutan. Kepercayaan dalam suatu kelompok menciptakan jaringan sosial. Gapoktan Sinar Harapan sudah menerapkan unsur modal sosial berupa kepercayaan, jaringan sosial, dan norma sosial dalam pengelolaannya, sedangkan Gapoktan Mahardika baru menerapkan unsur kepercayaan dan norma sosial saja. Hal ini karena sebagian anggota Gapoktan Mahardika bukan dari penduduk setempat, melainkan dari luar wilayah. Penerapan unsur jaringan sosial perlu ditingkatkan dalam pengelolaan HKm di Gapoktan Mahardika agar pengelolaannya dapat berkelanjutan.

Kata kunci: modal sosial, hutan kemasyarakatan, jaringan sosial, kepercayaan, norma sosial

ABSTRACT

Social capital has a role in the management of Community Forests (HKm) as a resource that could encourage individuals or groups to work together in achieving mutual goals. The objective of this study was to determine the social capital of the HKm management in the area of Batutegi Forest Management Unit, Tanggamus Regency, by farmers groups as Gapoktan Sinar Harapan and Gapoktan Mahardika. Data were collected in both farmers groups through structured interviews, unstructured interviews, observations, and literature review. The social capital of the community was analyzed qualitatively using social capital elements, such as trust, social networks, and social norms. The results showed that social capital has a positive role in managing HKm to encourage the community to manage the forest in sustainable manners. The results also showed that trust in a group creates social networks. Gapoktan Sinar Harapan implemented the three elements of social capital, such as trust, social networks, and social norms in their management. Gapoktan Mahardika only implemented trust and social norms,

because the member of Gapoktan Mahardika was not only consisted of local people but also some immigrants. Hence, the implementation of social networks is needed in the management of HKm by Gapoktan Mahardika.

Keywords: *community forest, social capital, social networks, social norms, trust*

PENDAHULUAN

Modal sosial (*social capital*) adalah nilai-nilai atau norma-norma masyarakat dalam mengelola hutan dengan kerja sama demi mencapai kebutuhan yang berkelanjutan. Modal sosial merupakan aspek penting untuk membangun pertanian yang lebih maju (Harahap dan Herman 2017). Modal sosial masyarakat seperti kepercayaan, gotong royong, jaringan dan sikap, berperan besar terhadap perilaku masyarakat dan bila dikelola dengan baik akan mampu memberdayakan masyarakat (Thobias 2013). Modal sosial merupakan strategi yang baik digunakan untuk pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat, terutama dalam pengembangan ekonomi pedesaan (Nababan et al. 2016).

Modal sosial merupakan norma dan nilai bersama yang dibangkitkan oleh kepercayaan (*trust*), dimana *trust* merupakan dasar bagi sikap keteraturan, kejujuran, dan perilaku kooperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas masyarakat (Cahyono dan Adhiatma 2012). Aksi kolektif masyarakat dapat terfasilitasi oleh modal sosial dan memberikan pengaruh yang kuat pada proses peningkatan kesejahteraan sosial (Qurniati et al. 2017a; b). Apabila modal sosial kuat, maka hal tersebut dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam mendukung program pembangunan. Modal sosial yang tinggi akan berdampak pada tingginya partisipasi masyarakat, sehingga pemerintah akan memiliki akuntabilitas yang lebih kuat (Ekawati dan Nurrochmat 2014).

Penerapan modal sosial yang baik akan mampu memberdayakan masyarakat dan sangat berpengaruh dalam keberhasilan pengelolaan sumber daya alam yang lestari (Nurrochmat et al. 2016; Pranadji 2016). Tingkat modal sosial dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat secara lestari dapat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dan kelembagaan lokalnya (Febryano et al. 2014). Partisipasi masyarakat juga dapat mempertahankan kelestarian sumber daya hutan dengan menerapkan modal budaya dan pengetahuan lokal (Salampessy et al. 2015). Laura et al. (2018) melaporkan bahwa masyarakat Dusun Limang membangun struktur perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan dan pengelolaan potensi alam sebagai strategi bertahan hidup dengan memanfaatkan modal sosial masyarakat untuk memperbaiki kondisi ekonomi menjadi lebih sejahtera.

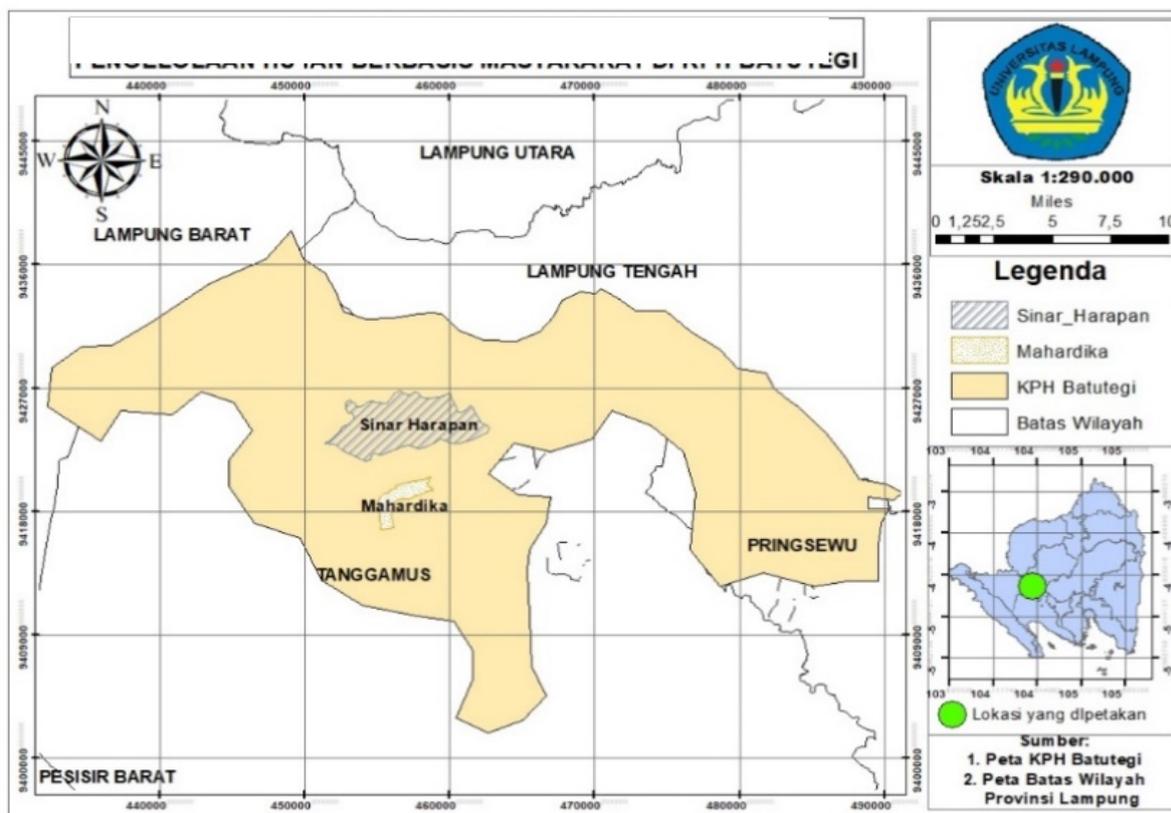
Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan salah satu upaya dalam melestarikan kawasan hutan dan memberikan manfaat pada masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat pada pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan hutan sangat diharapkan dan menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai pelaksana, namun juga sebagai penerima manfaat (Nugroho 2015). Program HKm bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutannya (Kaskoyo et al. 2017). Agar kelestarian hutan terjaga, ijin pengelolaan hutan diberikan dengan syarat masyarakat tidak mengembangkan jenis tanaman dengan sistem monokultur, melainkan dengan sistem kebun campuran atau agroforestri (Winarni et al. 2016).

Kajian tentang perubahan pendapatan petani pada Gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang telah mendapatkan Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) telah dilakukan penelitian sebelumnya (Qurniati et al. 2018). Hasil penelitian tersebut melaporkan kenaikan pendapatan petani anggota Gapoktan Sinar Harapan dari Rp. 7.640.652/ha/tahun

menjadi Rp. 33.060.185/ha/tahun setelah mendapatkan ijin IUPHKm, namun pada Gapoktan Mahardika pendapatan petani turun dari Rp. 7.500.476/ha/tahun menjadi Rp. 3.254.091/ha/tahun setelah mendapatkan ijin IUPHKm. Hal ini terjadi akibat adanya perbedaan modal sosial yang dimiliki oleh kedua gapoktan tersebut dalam pengelolaan HKm. Perbedaan perubahan pendapatan juga terjadi di HKm Bina Wana, Lampung Barat dan Mekar Jaya, Way Kanan (Wulandari dan Budiono 2016). Dalam kaitannya dengan pengelolaan lahan HKm, maka modal sosial akan mampu memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam yang lestari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modal sosial masyarakat pengelola HKm di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batutegi melalui tiga unsur utamanya yaitu kepercayaan, norma, dan jaringan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Gapoktan Mahardika dan Gapoktan Sinar Harapan yang telah mendapatkan IUPHKm di Wilayah KPH Batutegi. Gapoktan Sinar Harapan berada Resort Datar Setuju kawasan Hutan Lindung Register 39 Kota Agung Utara, Kabupaten Tanggamus. Luas lahan yang dikelola Gapoktan Sinar Harapan adalah 5.031,44 ha. Gapoktan Mahardika berada di Resort Batulima, Register 32 Bukit Rindingan, Kabupaten Tanggamus dengan luas lahan kelola sebesar 2.366,50 ha. Peta lokasi penelitian disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta lokasi penelitian.

Pengambilan data dilakukan selama bulan Desember 2018 melalui wawancara terstruktur menggunakan kuesioner, wawancara tidak terstruktur, observasi, dan studi literatur. Jumlah anggota gapoktan HKm yang tergabung pada Gapoktan Sinar Harapan adalah 1.500 anggota dan Gapoktan Mahardika 1.500 anggota karena jumlah anggota yang banyak (lebih dari 100),

maka dilakukan pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan Rumus Slovin (Amirin 2011):

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana n adalah jumlah sampel atau responden, N adalah jumlah populasi, dan e adalah tingkat kesalahan yang masih ditolerir (15%).

Jumlah sampel minimal yang didapatkan berdasarkan rumus tersebut adalah 45 responden untuk masing-masing gapoktan. Pada penelitian ini jumlah sampel yang digunakan untuk masing masing gapoktan adalah 50 responden sehingga total jumlah responden dari dua gapoktan adalah 100 responden. Jumlah ini merupakan jumlah responden pada wawancara terstruktur yang dipilih secara *systematic random sampling*.

Pengambilan sampel responden untuk wawancara tidak terstruktur dilakukan menggunakan metode *snowball sampling*. Metode ini dipilih untuk menggali informasi secara kualitatif dari responden yang dipilih secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa responden tersebut memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian (Junaidi et al. 2016). Jumlah responden pada wawancara ini untuk masing-masing gapoktan adalah 5 orang atau total 10 responden. Responden yang dipilih meliputi ketua gapoktan dan pengurus gapoktan (bendahara, sekretaris, dan pengurus lainnya). Observasi dilakukan dengan menggali serta mengamati perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan. Studi literatur juga dilakukan untuk menambah kelengkapan data dengan cara mempelajari, mengutip buku, dan laporan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara menguraikan dan menjelaskan hasil wawancara secara sistematis (Kholifa 2015; Qurniati et al. 2017a). Analisis ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana kondisi modal sosial petani HKm serta unsur-unsur pembentuknya. Unsur pembentuk modal sosial yang dikumpulkan yaitu kepercayaan (*trust*), jaringan sosial (*social networks*), dan norma sosial (*social norms*) (Fukuyama 2000). Norma merupakan aturan yang mengatur kelompok baik berupa aturan tertulis atau aturan tidak tertulis. Aturan tertulis biasanya di buat oleh pemerintah dan kelompok itu sendiri untuk ditaati oleh seluruh anggota. Aturan ini efektif untuk digunakan dalam kelompok. Junaidi et al. (2016) menjelaskan bahwa selain terbentuk oleh aturan-aturan tertulis, norma sosial juga ada yang tidak tertulis seperti sikap dan perilaku anggota kelompok. Aturan tidak tertulis kurang efektif untuk digunakan karena tidak ada sanksi maupun aturan yang tertulis. Oleh sebab itu di dalam suatu kelompok harus ada aturan untuk mengatur jalannya kelompok dan anggotanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Masyarakat yang tergabung dalam Gapoktan Mahardika dan Gapoktan Sinar Harapan memiliki pekerjaan utama sebagai petani HKm. Selain itu, petani HKm juga memiliki pekerjaan tambahan seperti sebagai pegawai negeri sipil, tukang ojek, buruh, wirausaha dan pendamping desa. Anggota Gapoktan Mahardika lebih banyak yang memiliki pekerjaan tambahan dibandingkan pada Gapoktan Sinar Harapan (Tabel 1). Petani HKm yang memiliki pekerjaan tambahan akan memperluas jaringan sosialnya tidak hanya dengan sesama petani HKm tetapi dengan rekan kerja pada pekerjaan sampingannya. Petani HKm yang memiliki pekerjaan tambahan mayoritas memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan petani yang tidak memiliki pekerjaan tambahan. Menurut Barki et al. (2017), tingkat pendidikan petani gapoktan yang semakin tinggi akan meningkatkan pengertian mereka terhadap aturan norma dan nilai yang diterapkan pada masing-masing gapoktan.

Tabel 1. Karakteristik responden anggota Gapoktan Mahardika dan Sinar Harapan.

No	Karakteristik	Gapoktan Mahardika	Gapoktan Sinar Harapan
1	Jenis Pekerjaan		
	• Anggota gapoktan HKm	35 (70%)	46 (92%)
	• Anggota gapoktan HKm dan pekerjaan tambahan	15 (30%)	4 (8%)
2	Tingkat Pendidikan		
	• Tidak Sekolah	2 (4%)	0 (0%)
	• SD	21 (42%)	14 (28%)
	• SMP	13 (26%)	26 (52%)
	• SMA	14 (28%)	9 (18%)
	• Sarjana	0 (0%)	1 (2%)
3	Pendapatan (Rp/bulan)		
	• >500.000	0 (0%)	0 (0%)
	• 500.000-1.500.000	13 (26%)	14 (28%)
	• 1.500.000-2.500.000	29 (58%)	20 (40%)
	• 2.500.000-3.500.000	4 (8%)	5 (10%)
	• > 3.500.000	4 (8%)	11 (22%)
4	Lama Tinggal (Tahun)		
	• < 10	6 (12%)	8 (16%)
	• 11 - 20	12 (24%)	7 (14%)
	• 21 - 30	7 (14%)	14 (28%)
	• 31 - 40	5 (10%)	7 (14%)
	• >40	20 (40%)	14 (28%)

Lama tinggal anggota kedua gapoktan berkisar antara 10-40 tahun. Petani sudah menggarap lahan HKm tersebut sebelum adanya izin HKm sehingga lahan yang didapatkan ada yang sudah turun-temurun. Oleh sebab itu semakin lama tinggal di suatu tempat maka akan semakin mengenal dan akan timbul kepercayaan diantara anggota (Wulandari dan Inoue 2018). Tingkat kepercayaan seseorang dapat terlihat dari seberapa lama kebersamaan dengan orang tersebut (Rahmawati 2015). Ketiga elemen tersebut yaitu jaringan, norma, dan kepercayaan merupakan unsur pembentuk modal sosial.

Tingkat pendidikan di Gapoktan Mahardika dan Gapoktan Sinar Harapan dapat dikatakan rendah, yaitu hanya sampai tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Barki et al. (2017), tingkat pendidikan responden masih tergolong rendah dan dapat menjadi kendala bagi anggota gapoktan dalam menerima teknologi-teknologi baru untuk pengembangan usaha tani. Akses menuju sekolah (SMA) yang jauh menjadi salah satu faktor penghambat yang menyebabkan masyarakat kurang berminat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Selain itu biaya transportasi yang cukup besar juga menjadi penghambat untuk melanjutkan studi ke tingkat pendidikan SMA. Pendapatan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat pendidikan. Anggota gapoktan yang pendidikannya rendah secara umum hanya mendapatkan hasil dari bertani HKm saja. Anggota gapoktan yang tingkat pendidikan yang tinggi dapat mencari pekerjaan tambahan. Selain pendidikan, umur juga berpengaruh pada pendapatan, banyaknya anggota di kedua gapoktan yang menggarap lahan yaitu kisaran umur 31-50 tahun.

Pendapatan anggota Gapoktan Mahardika dan Gapoktan Sinar Harapan berkisar antara Rp. 500.000/bulan – Rp.3.500.000/bulan. Rata-rata pendapatan anggota Gapoktan Mahardika sebesar Rp.1.827.000/bulan, sedangkan di Gapoktan Sinar Harapan sebesar Rp. 2.668.367/bulan. Jika dibandingkan dengan standar Upah Minimum Kabupaten (UMK)

Tanggamus Tahun 2019 sebesar Rp. 2.241.269,24/bulan, pendapatan anggota Gapoktan Mahardika masih di bawah UMK sedangkan pendapatan anggota Gapoktan Sinar Harapan di atas UMK, sehingga dapat dikatakan bahwa anggota Gapoktan Sinar Harapan sudah dapat hidup layak. Modal sosial memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan petani. Hal ini sejalan dengan penelitian Widodo (2015) yang menyatakan bahwa bahwa modal sosial dapat mendukung peningkatan produktivitas lahan jagung.

Anggota Gapoktan Sinar Harapan dan Mahardika senantiasa menaati peraturan yang berlaku di dalam kelompok, tetapi keakraban dan kekeluargaan yang erat diantaranya hanya terjalin pada anggota Gapoktan Sinar Harapan, sedangkan anggota Gapoktan Mahardika sebagian kurang berkomunikasi dengan baik. Hal tersebut termasuk unsur modal sosial norma, kepercayaan, dan berbentuk jaringan sosial. Selain modal sosial, anggota Gapoktan Sinar Harapan memiliki keterampilan serta keahlian yang lebih dibandingkan dengan anggota Gapoktan Mahardika seperti cara tertentu dalam melakukan pemeliharaan tanaman. Kholifa (2015) berpendapat bahwa bertambahnya modal manusia dan modal sosial dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan.

Modal Sosial

Kepercayaan

Kepercayaan merupakan salah satu karakteristik pertama yang harus terdapat pada sebuah kelompok (Harahap dan Herman 2017). Menurut Suharti et al. (2016), kepercayaan dapat dilihat dari hubungan timbal balik dan tolong-menolong dalam pergaulan sehari-hari. Kepercayaan yang terdapat di Gapoktan Mahardika dan Gapoktan Sinar Harapan disajikan pada Tabel 2. Kepercayaan yang terjalin pada setiap anggota kelompok dengan anggota lain untuk saling membantu dalam bentuk bercocok tanam. Pemberian bantuan fisik maupun sumbangan ide merupakan contoh penerapan kepercayaan yang terdapat pada kedua gapoktan. Kerjasama atau bantuan dalam bentuk ide-ide diberikan ketika salah satu anggota mengalami kesulitan seperti dalam mengatasi masalah hama atau penyakit yang terdapat pada tanamankopi dan lada. Hal yang biasanya dilakukan adalah bekerjasama dalam melakukan penyemprotan atau pemangkasan cabang kopi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Pamungkas dan Priyadi (2018), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kandang Gunung belum mampu menawarkan ide-ide cemerlang maupun inovasi yang mendorong kerjasama warga dalam pengelolaan Desa Wisata Nongkosawit, sehingga belum terjalin solidaritas sosial antara Pokdarwis Kandang Gunung dengan warga Desa Nongkosawit.

Tabel 2.Kepercayaan di Gapoktan Mahardika dan Gapoktan Sinar Harapan.

Kepercayaan	Gapoktan Mahardika		Gapoktan Sinar Harapan	
	Ada	Tidak	Ada	Tidak
Kepercayaan terhadap anggota kelompok dalam bekerjasama dan memudahkan pekerjaan	√		√	
Kepercayaan antara anggota kelompok maupun pengurus mampu mempererat hubungan	√		√	
Kepercayaan anggota kepada anggota lain untuk menjaga kelanggengan kelompok		√	√	

Kerjasama dalam bentuk bantuan fisik berupa kegiatan gotong-royong membuat akses jalan menuju lahan HKm dan membuat obat pengendali hama. Kerjasama tersebut menunjukkan adanya kepercayaan yang melandasi hubungan dalam suatu kelompok. Yuliarmi

(2014) menjelaskan bahwa hubungan yang terjalin antara anggota kelompok dalam suatu organisasi akan membentuk suatu kepercayaan sehingga ada keterikatan yang saling menguntungkan. Komunikasi yang baik akan menciptakan keeratn hubungan dan menumbuhkan kepercayaan. Sebagai contoh, anggota yang tidak tergabung dalam kepengurusan mempercayakan keuangan kelompok terhadap bendaharadenganharapan uang tersebut tidak digunakan untuk keperluan pribadinya.

Kepercayaan anggota Gapoktan Sinar Harapan dan Gapoktan Mahardika tidak dipengaruhi oleh etnis maupun agama. Anggota gapoktan tidak membeda-bedakan suatu agama ataupun etnis dalam bergaul, sehingga ikatan kepercayaan yang terjalin sangat kuat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Amelia et al. (2019) bahwa masyarakat bergaul tanpa memandang suku dan tidak membatasi pergaulan dengan siapapun. Penelitian yang dilakukan oleh Qurniati et al. (2017a) menjelaskan bahwa kesamaan dalam hubungan suku dan agama dapat memperkuat kepercayaan masyarakat seperti ikatan modal sosial. Kepercayaan antara anggota kelompok maupun pengurus akan mampu mempererat ikatan yang terjalin dalam kelembagaan gapoktan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepercayaan di antara anggota untuk menjaga keberlanjutan kelompok dilakukan dengan menciptakan komunikasi yang baik melalui kebebasan berpendapat. Contohnya jika terjadi suatu masalah dalam kelompok maka akan diadakannya pertemuan dengan seluruh anggota. Masalah tersebut dibahas dan masing-masing anggota dapat memberikan pendapat untuk mencari solusi terbaik. Setelah disepakati maka argumen tersebut diterima dan dijalankan oleh seluruh anggota. Bentuk kepercayaan seperti itu diterapkan pada Gapoktan Sinar Harapan. Penerapan kepercayaan ini tidak terjalin di Gapoktan Mahardika karena jarang dilakukannya pertemuan kelompok dan masalah hanya dipecahkan oleh ketua kelompok saja.

Jaringan Sosial

Jaringan yang ada didalam gapoktan dilakukan dalam bentuk saling bekerja sama antar anggota dan kebersamaan dengan saling bertemu dan mengenal satu sama lainnya. Kerjasama antar anggota pada Gapoktan Mahardika dan Gapoktan Sinar Harapandilakukan dalam bentuk kegiatan sosial sesama tetangga. Hal ini karena pembagian kelompok tani dalam gapoktan berdasarkan dusun sehingga dalam satu kelompok terdiri dari tetangga yang berdekatan. Kegiatan sosial yang biasa dilakukan misalnya dengan gotong royong membersihkan tempat pertemuan kelompok dan membuat pupuk. Menurut Laura et al. (2018), kegiatan atau kebiasaan masyarakat tidak terlepas dari modal sosial yang diterapkanyaitu jaringan sosial. Jaringan sosial yang terdapat di Gapoktan Mahardika dan Gapotan Sinar Harapan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jaringan sosial di Gapoktan Mahardika dan Gapoktan Sinar Harapan.

Jaringan Sosial	Gapoktan Mahardika		Gapoktan Sinar harapan	
	Ada	Tidak	Ada	Tidak
Saling bekerja sama anggota kelompok	√		√	
Sering bertemu antar anggota kelompok		√	√	
Saling mengenal antara anggota kelompok	√		√	

Gapoktan Sinar Harapan sering melakukan pertemuan kelompok sehingga anggota kelompok saling bertemu. Pertemuan dilakukan 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali untuk evaluasi, penyuluhan, dan pembagian bibit. Petani tersebut bertemu di lahan HKm maupun di lingkungan rumahnya. Anggota kelompok Gapoktan Mahardika jarang mengadakan pertemuan rutin. Menurut Irfarinda dan Lawang (2018), interaksi akan membentuk rasa percaya dan akan membentuk jaringan sehingga memberikan keuntungan positif untuk kedua belah pihak.

Petani yang tergabung dalam anggota Gapoktan Mahardika tidak semua merupakan penduduk Pekon Sidomulyo melainkan dari luar pekon bahkan luar kabupaten. Petani tersebut berasal dari Pringsewu, Talang Padang, Kota Agung bahkan ada yang tinggal di Bandar Lampung. Anggota gapoktan yang tidak tinggal di dekat lahan HKm menggarap lahannya hanya pada saat akan panen atau tanam saja. Pemeliharaan seperti pemangkasan cabang atau pembersihan gulma dan rumput liar tidak dilakukan. Anggota gapoktan yang memiliki lahan garapan HKm tetapi tidak tinggal di desa tersebut menggunakan buruh tani dengan sistem pembayaran upah natura (bagi hasil). Hal ini menyebabkan jaringan sosial yang ada di Gapoktan Mahardika kurang berjalan dengan baik. Hasil penelitian sejalan dengan Nababan et al. (2016) yang menjelaskan bahwa jaringan sosial di Desa Margasari berada pada kategori rendah karena banyak anggota kelompok yang tidak aktif.

Norma Sosial

Norma sosial yang terdapat di Gapoktan Sinar Harapan dan Gapoktan Mahardika terdiri dari aturan tertulis, tidak tertulis, serta norma agama dan tradisional (Tabel 4). Norma ini mengandung sanksi sosial dan menentukan pola tingkah laku dalam masyarakat dalam konteks hubungan sosial. Aturan tertulis yang diterapkan oleh kedua gapoktan meliputi, larangan dalam menebang pohon, larangan untuk membuka lahan baru tanpa izin, dan larangan mencuri kayu yang terdapat di lahan HKm. Aturan tidak tertulis yang diterapkan seperti tidak mengotori lahan atau mencemari HKm dengan sampah yang sulit didaur ulang, melaksanakan kegiatan kelompok seperti hadir dalam rapat, serta mengikuti penyuluhan dan lainnya.

Tabel 4. Norma sosial di Gapoktan Mahardika dan Gapoktan Sinar Harapan.

Norma Sosial	Gapoktan Mahardika		Gapoktan Sinar harapan	
	Ada	Tidak	Ada	Tidak
Aturan tertulis	√		√	
Aturan tidak tertulis		√	√	
Norma/nilai agama	√		√	
Norma/nilai tradisional	√		√	

Aturan tertulis adalah aturan yang dibuat dari KPH Batutegi untuk masing-masing gapoktan yang tertulis di dalam peraturan perhutanan sosial. Kedua gapoktan memiliki aturan tertulis baik dari KPH atau dari dalam gapoktan itu sendiri. Anggota kelompok Gapoktan Mahardika maupun Gapoktan Sinar Harapan menyatakan bahwa petani yang menggarap lahan HKm mengetahui dan memahami aturan tertulis tersebut termasuk larangan-larangan serta sanksi yang diberikan jika melanggar. Contohnya adalah larangan menebang pohon, sanksi dan dendanya, serta kewajiban mengganti tanaman yang ditebang.

Gapoktan Sinar Harapan memiliki aturan tidak tertulis, namun tidak semua anggota kelompok gapoktan mengetahui aturan tidak tertulis tersebut. Aturan tidak tertulis harus ditaati oleh pengurus di dalam kelompok dalam menjalankan tugasnya, contohnya bendahara mengurus keluar masuknya keuangan kelompok, sekretaris mencatat semua kegiatan yang berjalan dan mengontrol lahan anggota kelompoknya. Selain itu terdapat aturan adat setempat yang harus ditaati oleh seluruh anggota. Aturan tidak tertulis juga dimiliki oleh Gapoktan Mahardika tetapi anggota kelompoknya tidak mengetahui adanya aturan ini. Kurangnya komunikasi ketua gapoktan dengan anggota dan pengurusnya tentang aturan tidak tertulis ini menjadi salah satu faktor penyebabnya.

Nilai-nilai agama dan nilai-nilai tradisional dalam pengelolaan gapoktan juga diterapkan pada kedua gapoktan. Nilai agama yang diterapkan di kedua gapoktan relatif sama. Nilai-nilai ini diyakini dan dijalankan sudah turun-temurun seperti syukuran dalam rangka bersyukur

kepada Tuhan Yang Maha Esa atas suatu kelimpahan yaitu panen, atau sedekah kepada masyarakat yang kurang mampu dari hasil panennya. Adanya nilai-nilai agama di kedua gapoktan ini membawa hal yang positif, sehingga petani maupun masyarakat setempat tidak melanggar ataupun menyimpang dari nilai yang sudah ada. Hal ini sejalan dengan penelitian Pamungkas dan Priyadi (2018) yang menyatakan bahwa nilai keagamaan di Desa Wisata Nongkosawit dapat mencegah individu untuk berbuat sesuatu yang menyimpang. Contoh nilai agama yang lainnya yaitu jika salah satu anggota kelompok mengalami musibah seperti kerabatnya meninggal dunia, maka anggota kelompok yang lain akan saling membantu didalam proses tersebut. Penelitian Harahap dan Herman (2017) menjelaskan bahwa jika ada masyarakat yang meninggal dunia, maka pada hari tersebut seluruh petani tidak ada yang turun ke lahan usaha tani.

SIMPULAN

Masyarakat pengelola HKm yang tergabung dalam anggota Gapoktan Sinar Harapan dan Mahardika di KPH Batutege menerapkan unsur modal sosial yaitu kepercayaan, jaringan sosial dan norma sosial. Unsur modal sosial memiliki peran positif dalam pengelolaan HKm. Kerja sama, saling mengenal, saling membantu merupakan salah satu bentuk jaringan sosial yang dibentuk melalui kepercayaan. Norma atau nilai-nilai berupa aturan tertulis, aturan tidak tertulis, serta nilai tradisi dan nilai agama ditaati oleh anggota gapoktan. Berdasarkan hasil penelitian ini terbukti bahwa semakin banyak unsur modal sosial yang diterapkan dalam mengelola HKm maka pendapatannya semakin baik.

SANWACANA

Terima kasih kepada Universitas Lampung yang telah memberikan pendanaan untuk penelitian ini melalui skema Penelitian Unggulan Dana DIPA Universitas Lampung tahun pelaksanaan 2019 dengan nomor kontrak 2231/UN26.21/PN/2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, N. R., Kartodihardjo, H., and Sundawati, L. 2019. Peran Modal Sosial Masyarakat Penambang Emas dalam Mempertahankan Tambang Ilegal di Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah. *Jurnal Sylva Lestari* 7(3): 255–264.
- Amirin, T. 2011. *Populasi dan Sampel Penelitian 4: Ukuran Sampel Rumus Slovin*. Erlangga, Jakarta.
- Barki, K., Satmoko, S., and Eddy, B. T. 2017. Pengaruh Modal Sosial terhadap Tingkat Adopsi Inovasi Padi Organik pada Anggota Kelompok Tani Paguyuban Al-Barokah, Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. *Agromedia* 35(2): 1–9.
- Cahyono, B., and Adhiatma, A. 2012. Peran Modal Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani Tembakau Di Kabupaten Wonosobo. in: *Proceedings of Conference In Business, Accounting and Management (CBAM) 2012* 131–144.
- Ekawati, S., and Nurrochmat, R. D. 2014. Hubungan Modal Sosial dengan Pemanfaatan dan Kelestarian Hutan Lindung. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 11(1): 11–15.
- Febryano, I. G., Suharjo, D., Darusman, D., Kusmana, C., and Hidayat, A. 2014. The Roles and Sustainability of Local Institution of Mangrove Management in Pahawang Island.

- Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 20(2): 69–76.
- Fukuyama, F. 2000. *Social Capital: Culture Matter, How Value Shape Human Progress*. Basic Book, New York, USA.
- Harahap, M., and Herman, S. 2017. Social Capital Relationship with Vegetable Farmers Productivity (Case Study on The Group of Tani Barokah Village Tanah Enam Ratus District Medan Marelan). *Journal of Agribusiness Sciences* 1(1): 49–57.
- Irfarinda, M., and Lawang, M. Z. R. 2018. Mutual Trust Between Scavengers and Collectors in Bekasi Region: Social Capital Perspective. *Jurnal Sosio Konsepsia* 7(3): 1–14.
- Junaidi, Rosnita, and Kausar. 2016. Analisis Modal Sosial pada Keberdayaan Petani Karet (Studi Kasus Petani Karet di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Riau* 3(1): 1–9.
- Kaskoyo, H., Mohammed, A. J., and Inoue, M. 2017. Impact of community forest program in protection forest on livelihood outcomes: A case study of Lampung Province, Indonesia. *Journal of Sustainable Forestry* 36(3): 250–263. DOI: 10.1080/10549811.2017.1296774
- Kholifa, N. 2015. Pengaruh Modal Sosial terhadap Produktivitas Petani (Studi Kasus di Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap). *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi* 5(2): 89–97.
- Laura, N., Sari, R. D., Setiawan, I., and Herdiyanti, H. 2018. Peran Modal Sosial Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Alam Sebagai Strategi Bertahan Hidup di Dusun Limang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. *Society* 2(6): 74–82.
- Nababan, E. J. K., Qurniati, R., and Kustanti, A. 2016. Modal Sosial pada Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Mangrove di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Sylva Lestari* 4(2): 89–100. DOI: 10.23960/jsl2489-100
- Nugroho, S. S. 2015. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Melalui Penguatan Lembaga Masyarakat di Desa Hutan (Kajian Hukum Penguatan Kapasitas LMDH dan Peningkatan Efektivitas PHBM di Desa Dampit, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi). *Jurnal Sosial* 12(2): 45–48.
- Nurrochmat, D. R., Darusman, D., and Ekayani, M. 2016. *Kebijakan Pembangunan Kehutanan dan Lingkungan*. IPB Press, Bogor.
- Pamungkas, S. B., and Priyadi, B. P. 2018. Analisis Modal Sosial dalam Pengelolaan Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review* 7(4): 1–13.
- Pranadji, T. 2016. Penguatan Modal Sosial Untuk Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Dalam Pengelolaan Agroekosistem Lahan Kering Studi Kasus di Desa-Desa (Hulu DAS) Ex Proyek Bangun Desa, Kabupaten Gunungkidul dan Ex Proyek Pertanian Lahan Kering, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Agro Ekonomi Indonesian Agency For Agricultural Research and Development (IAARD)* 24(2): 178–206. DOI: 10.21082/jae.v24n2.2006.178-206
- Qurniati, R., Duryat, and Riniarti, M. 2018. *Pendapatan Petani setelah Mendapatkan Ijin Hutan Kemasyarakatan*.
- Qurniati, R., Febryano, I. G., and Zulfiani, D. 2017a. How trust influence social capital to support collective action in agroforestry development? *Biodiversitas* 18(3): 1201–1206. DOI: 10.13057/biodiv/d1844
- Qurniati, R., Hidayat, W., Kaskoyo, H., Firdasari, F., and Inoue, M. 2017b. Social Capital in Mangrove Management: A Case Study in Lampung Province, Indonesia. *Journal of Forest and Environmental Science* 33(1): 8–21. DOI: 10.7747/jfes.2017.33.1.8
- Rahmawati, P. A. 2015. Hubungan Antara Kepercayaan dan Keterbukaan Diri terhadap Orang Tua dengan Perilaku Memaafkan pada Remaja yang Mengalami Keluarga Broken Home di SMKN 3 & SMKN 5 Samarinda. *Journal Psikologi* 3(1): 395 – 406.
- Salampessy, M. L., Febryano, I. G., Martin, E., Siahaya, M. E., and Papilaya, R. 2015. Cultural Capital of the Communities in the Mangrove Conservation in the Coastal areas of Ambon

- Dalam Bay, Moluccas, Indonesia. *Procedia Environmental Sciences* 23: 222–229. DOI: 10.1016/j.proenv.2015.01.034
- Suharti, S., Darusman, D., Nugroho, B., and Sundawati, L. 2016. Strengthening social capital for propelling collective action in mangrove management. *Wetlands Ecology and Management* 24(6): 683–695. DOI: 10.1007/s11273-016-9496-9
- Thobias, E. 2013. Pengaruh Modal Sosial terhadap Perilaku Kewirausahaan (Suatu Studi pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud). *Jurnal Acta Diurna* 6(1): 125–133.
- Widodo, K. 2015. Analisis Pengaruh Modal Sosial Terhadap Produktifitas Lahan Jagung (Studi Kasus: Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobongan). Universitas Diponegoro.
- Winarni, S., Yuwono, S. B., and Herwanti, S. 2016. Struktur Pendapatan, Tingkat Kesejahteraan dan Faktor Produksi Agroforestri Kopi pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batutege (Studi di Gabungan Kelompok Tani Karya Tani Mandiri). *Jurnal Sylva Lestari* 4(1): 1–10. DOI: 10.23960/jsl141-10
- Wulandari, C., and Budiono, P. 2016. Social Capital Status on HKm Development in Lampung. in: *The International Conference of Indonesia Forestry Researchers III* Bogor, Indonesia.
- Wulandari, C., and Inoue, M. 2018. The Importance of Social Learning for the Development of Community Based Forest Management in Indonesia: The Case of Community Forestry in Lampung Province. *Small-scale Forestry* 17(3): 361–376.
- Yuliarmi, N. N. 2014. Peran Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Industri Kerajinan Di Provinsi Bali. *Jurnal Udayana* 1(1): 7–15.